

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (2005:5), mengemukakan bahwa prosedur ialah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Narko (2003:3), mengemukakan bahwa prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Sedangkan dalam wikipedia.org, disebutkan bahwa prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Jadi, pada dasarnya prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang terjadi berulang secara seragam.

3.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Prakoso (2003:1), mengemukakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Siahaan (2005 : 7), mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pembayarannya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia sendiri pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.3 Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Jenis reklame meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar / naskah reklame secara sendiri-sendiri, (diberi penjelasan pengertian sejenisnya termasuk didalamnya branding, painting, neon box, neon sign).
- b. Reklame kain
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Reklame melekat/ stiker
Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.
- d. Reklame Selebaran
Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda.
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
Reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
- f. Reklame udara
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain sejenisnya.
- g. Reklame apung
Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
- h. Reklame suara
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari alat oleh pengguna alat atau pesawat apapun.

i. Reklame film/slide dan sejenisnya

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

j. Reklame peragaan

Reklame yang diselenggarakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Yang tidak masuk dalam Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan luasan tidak melebihi ukuran 0,5 (nol koma lima) m²;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

3.1.4 Pengertian Penagihan Pajak

Soemitro (1996:17), mengemukakan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Rusdji (2004:6), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

3.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:8), mengemukakan bahwa hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan Intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak yang disebabkan antara lain:

- a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
- b. Tax Evasion, usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang (penggelapan pajak)

3.1.6 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pajak Reklame di Indonesia mempunyai hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya, sehingga sudah menjadi kewajiban masyarakat dan pihak yang terkait untuk mematuhi hal tersebut. Dasar hukum pajak reklame pada Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- 3. Keputusan Walikota Semarang Nomor 89 Tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Kelas Jalan Reklame.
- 4. Keputusan Walikota Semarang Nomor 90 Tanggal 8 Maret 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) di Kota Semarang

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Prosedur Penagihan Pajak Reklame

Pajak Reklame termasuk dalam official assesment karena tarif penagihan pajaknya ditentukan dari pemerintah. Berdasarkan perhitungan pajak reklame, maka kepala BAPENDA Kota Semarang menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pembayaran pajak reklame harus dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD. Apabila sampai tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak reklame yang terutang, maka dinyatakan terlambat dan akan dilakukan penagihan oleh petugas pajak.

1. Fungsi yang Terkait

a. Kepala Seksi Penagihan

Tugas dari kepala seksi penagihan dalam penagihan pajak reklame adalah mencairkan atau menagih tunggakan pajak reklame. Setelah itu memberikan tugas lapangan kepada pegawai.

b. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang biasa disebut dengan tenaga administrasi memiliki tugas dalam penagihan pajak reklame untuk menjalankan tugas dari kepala seksi untuk terjun langsung ke lapangan guna melakukan penagihan pajak reklame termasuk memberi surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan yustisi.

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, sebelum menyelenggarakan reklame Wajib Pajak diwajibkan mengajukan perizinan kepada pejabat yang berwenang.

2. Dokumen yang Digunakan

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah ketetapan pokok pajak.

b. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo

Surat yang dikeluarkan apabila setelah keluarnya SKPD tetapi Wajib Pajak belum juga membayar kewajibannya, dan surat pemberitahuan ini dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD.

c. Surat Teguran 1, 2, 3

Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jarak tanggal jatuh tempo antara surat teguran 1, 2 dan 3 adalah 30 (tiga puluh) hari setelah surat dikeluarkan.

d. Berita Acara

Surat yang dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang sifatnya untuk mengingatkan Wajib Pajak agar segera melunasi pajak reklame yang terutang.

e. Surat Pernyataan Wajib Pajak

Surat yang ditandatangani Wajib Pajak untuk menyatakan kesanggupan melunasi pajak terutang, dan apabila tidak segera melunasi, maka Wajib Pajak siap menerima konsekuensinya.

3. Catatan Akuntansi yang Digunakan

Di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini sistem pencatatan laporan keuangannya menggunakan akuntansi berbasis akrual, karena pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dan perubahan dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi

berbasis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Khusus untuk Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Akuntansi berbasis akrual adalah metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Dan berikut catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penagihan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang :

a. Jurnal Umum

Digunakan untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan dalam penagihan pajak reklame. Apabila pajak terutang, maka dicatat sebagai piutang. Dan Jurnal finansial yang digunakan dalam penagihan pajak reklame sebagai berikut:

a. Saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Piutang Pajak Reklame	XXX
Pendapatan Pajak Reklame-LO	XXX

b. Saat Penerimaan pajak

Kas	XXX
Piutang Pajak Reklame	XXX

b. LO / LRA

Laporan Operasional (LO) / Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, beban, surplus/defisit, ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

4. Data Pajak Reklame dari Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017 (sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017)

Pendapatan asli daerah kota Semarang yang berasal dari pembayaran pajak reklame setiap tahun mengalami peningkatan karena minat wajib pajak dalam pemasangan reklame tinggi sehingga wajib pajak yang mendaftarkan reklame semakin tahun bertambah. Tetapi dengan adanya peningkatan wajib pajak yang mendaftar piutang pajakpun meningkat karena adanya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran. Berikut merupakan data tentang jumlah wajib pajak yang mendaftarkan reklame, jumlah wajib pajak yang belum membayar reklame, jumlah piutang pajak reklame, dan realisasi pendapatan pajak reklame selama tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 (sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017).

Tabel 3.1
Data Pajak Reklame Dari Tahun 2015-4 Agustus 2017

No	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (4 Agustus 2017)
1.	Jumlah Wajib Pajak yang Mendaftarkan Reklame	11.118 Orang	12.573 Orang	8.104 Orang
2.	Jumlah Wajib Pajak Yang	187 Orang	587 Orang	1.1388 Orang

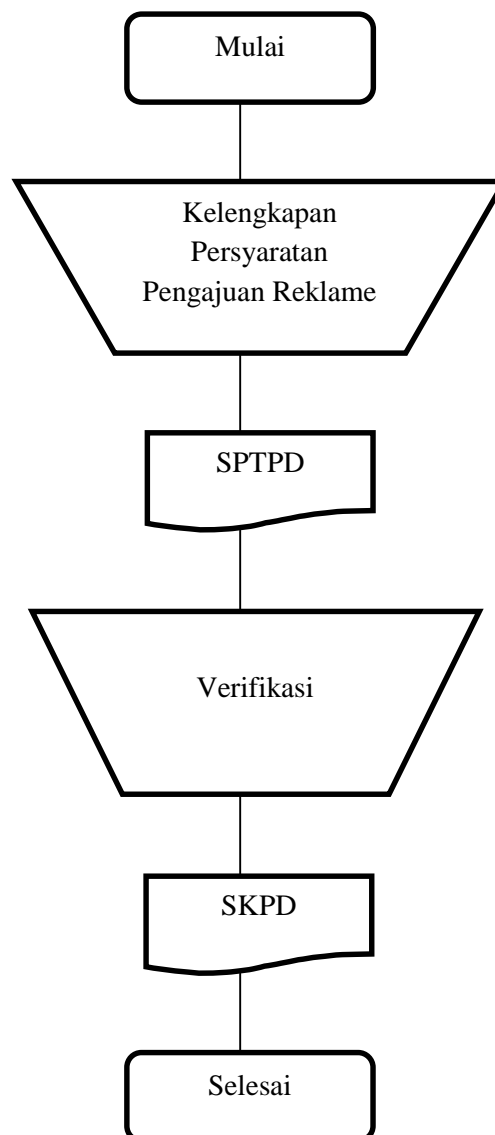
	Belum Membayar Pajak Reklame			
3.	Jumlah Piutang Yang Belum Lunas	Rp.676.746.156	Rp.1.839.669.875	Rp.3.853.813.000
4.	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame	Rp.25.910.827.083	Rp.29.132.469.884	Rp.15.440.433.350

Sumber: Hasil Wawancara Kepada Petugas BAPENDA (2017)

5. Bagan Alir

Bagan alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan masing masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Bagan alir juga bisa di definisikan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Berikut adalah bagan alir untuk menjelaskan lebih rinci tentang pengajuan pemasangan reklame dan prosedur penagihan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang terdapat pada gambar 3.1, gambar 3.2, gambar 3.3, dan gambar 3.4.

Gambar 3.1
Bagan Alir Pengajuan Pemasangan Reklame
Bagian Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan



Sumber : Hasil Wawancara Kepada Petugas BAPENDA (2017)

Keterangan :

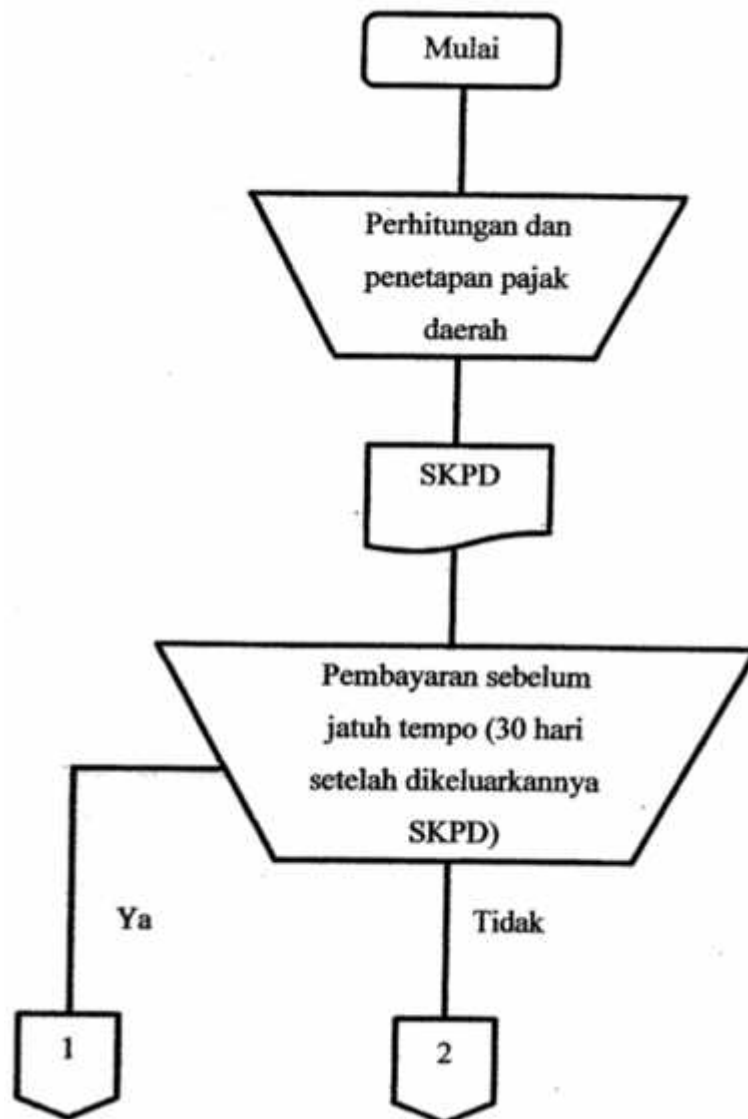
SPTPD: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Reklame

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Dari Bagan alir diatas, dapat dijelaskan bahwa proses untuk mengajukan reklame adalah sebagai berikut:

1. Pada saat wajib pajak ingin mengajukan reklame maka harus memberikan kelengkapan persyaratan seperti foto copy KTP, design/photo reklame, titik lokasi reklame, dan surat ijin atau surat-surat lainnya.
2. Setelah persyaratan pengajuan reklame tersebut sudah lengkap, maka wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara akurat mengenai nama wajib pajak, nama perusahaan biro reklame, alamat tempat usaha, kemudian jenis reklame yang akan dipasang. Selain itu wajib pajak juga harus membuat surat pernyataan apabila wajib pajak tidak mengisi data sesuai yang ada di lapangan, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak dan bersedia untuk diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
3. Kemudian setelah mengisi SPTPD data tersebut akan di input ke data reklame dan di verifikasi.
4. Setelah di verifikasi maka akan di proses dan menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut akan di berikan di bagian pelayanan wajib pajak untuk digunakan apabila wajib pajak yang ingin membayar pajak reklame.

Gambar 3.2
Bagan Alir Penagihan Pajak Reklame
Bagian Sub Bidang Penetapan



Sumber : Hasil Wawancara Kepada Petugas BAPENDA (2017)

Keterangan :

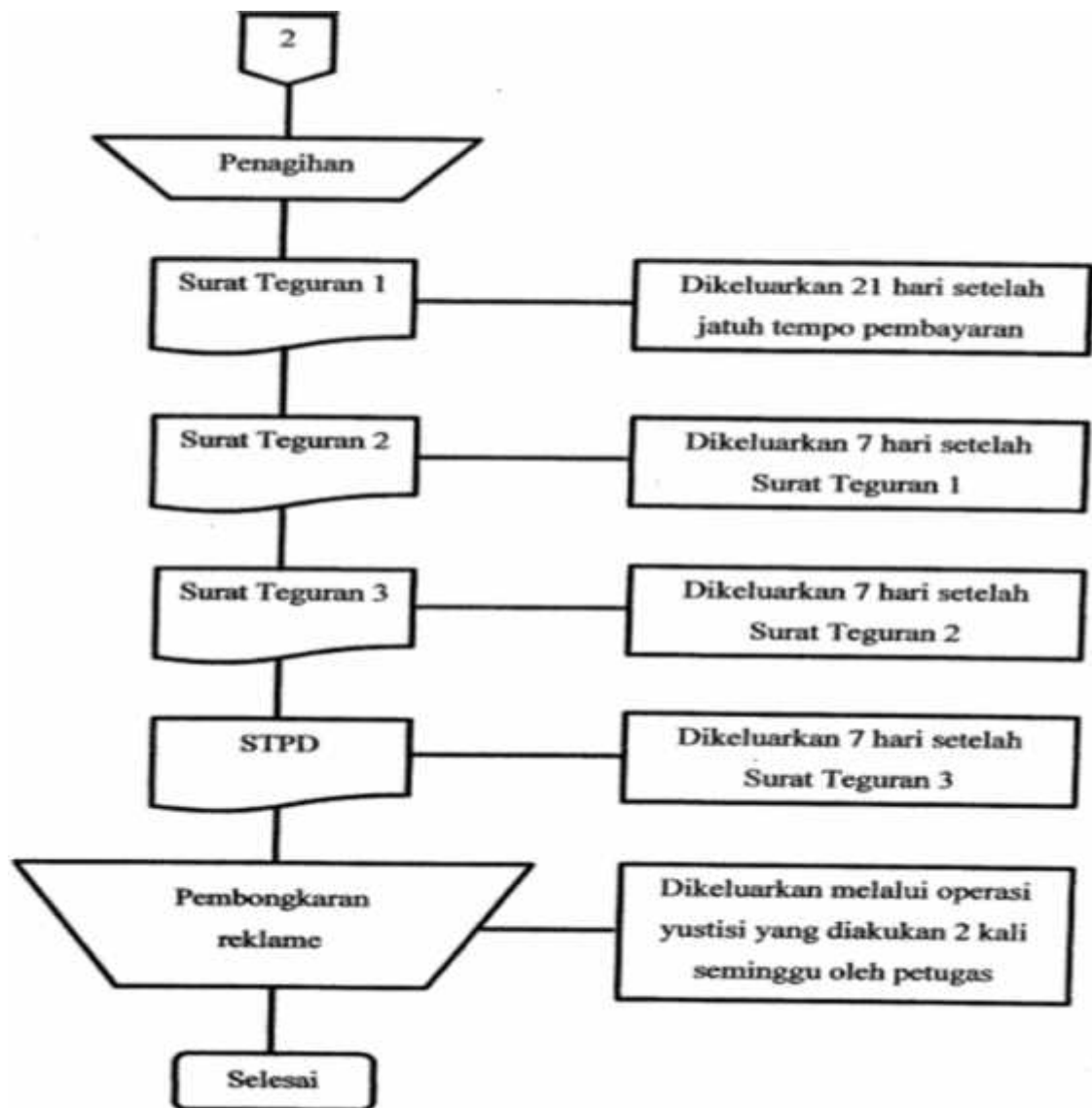
SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 3.3
Bagan Alir Penagihan Pajak Reklame (lanjutan)
Bagian Administrasi BAPENDA



Sumber : Hasil Wawancara Kepada Petugas BAPENDA (2017)

Gambar 3.4
 Bagan Alir Penagihan Pajak Reklame (lanjutan)
 Bagian Sub Bidang Penagihan



Sumber : Hasil Wawancara Kepada Petugas BAPENDA (2017)

Keterangan :

STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah

Dari bagan tersebut, proses penagihan atas pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh Sub Bidang Penetapan dengan menghitung kembali Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah di proses pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk membenarkan bahwa data tersebut valid kemudian, diserahkan ke Kepala BAPENDA Kota Semarang untuk di verifikasi dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sebelum jatuh tempo yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah dilakukan pembayaran pada loket Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maka Wajib Pajak akan menerima tanda terima pembayaran sebagai bukti pelunasan pajak terutang.
3. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum melakukan pembayaran, maka dinyatakan terlambat dan akan dilakukan penagihan oleh pegawai BAPENDA Kota Semarang.
4. Penagihan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala BAPENDA Kota Semarang. Tata cara penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame adalah sebagai berikut:
 - a. Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 21 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, dan ditambah dengan denda sebesar 2% tiap bulan selama 2 tahun dari dasar pengenaan pajak.
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran 1, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang dan ditambah dengan denda sebesar 2% tiap bulan selama 2 tahun dari nilai dasar pengenaan pajak. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar belum dilunasi maka akan dikeluarkan Surat Teguran II.
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Teguran II, Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka BAPENDA akan

menerbitkan Surat Teguran III dan ditambah dengan denda sebesar 2% tiap bulan selama 2 tahun dari nilai dasar pengenaan pajak. Dalam Surat Teguran I, II, dan III dikenakan sanksi bunga atau denda sehingga besarnya pajak yang ditagih dengan Surat Teguran I, II, dan III adalah sebesar pokok pajak yang tertera dalam SKPD dan perubahan besarnya denda.

- d. Apabila jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Teguran III yaitu 7 (tujuh) hari, maka dikeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- e. Langkah terakhir yang ditempuh oleh petugas pajak setelah dikeluarkannya Surat Teguran Pajak Daerah, terhadap Wajib Pajak yang belum atau tidak juga melunasi pajak yang terutang adalah dengan melakukan pembongkaran reklame. Pembongkaran reklame ini dilakukan oleh petugas BAPENDA Kota Semarang melalui Operasi Yustisi yang dilakukan dua kali dalam seminggu. Operasi Yustisi ini tidak hanya dilakukan untuk membongkar reklame yang bermasalah, tetapi juga membongkar reklame yang sudah selesai tanggal pemasangannya tetapi reklame tersebut belum diturunkan. Setelah dilakukan pembongkaran reklame, proses penagihan terus dilakukan sampai Wajib Pajak membayar pajak reklame yang terutang.

3.2.2 Hambatan Penagihan Pajak Reklame

Hambatan yang di hadapi oleh petugas Badan Pendapatan Daerah dalam penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran Wajib Pajak Reklame yang belum maksimal dalam melaporkan Obyek Pajak Baru
- b. Masih adanya ketidak akuratan Wajib Pajak dalam mengisi data contoh: nama Wajib Pajak, lokasi, dan ukuran reklame
- c. Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang melarang pemasangan Baliho yang ada di media jalan.

- d. Terbatasnya tempat saran pelayanan masyarakat / Wajib Pajak Reklame di wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa, Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki tindakan penagihan pajak disebabkan adanya utang pajak yang timbul dan kurang atau tidak dibayarnya pajak pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya piutang yang menumpuk di laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang. Dengan adanya kekurangan pembayaran pajak tersebut, maka BAPENDA Kota Semarang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), disamping itu BAPENDA Kota Semarang juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo. Dengan adanya Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo diharapkan utang pajak tersebut segera dibayarkan oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, maka tindakan selanjutnya adalah dengan menerbitkan Surat Teguran. Apabila Wajib Pajak masih belum membayar utang pajaknya, maka akan dilakukan operasi yustisi dengan pembongkaran reklame yang bermasalah. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang merancang prosedur penagihan pajak untuk menangani pelaksanaan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak yang bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian pada prosedur penagihan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdapat kelebihan dan kelemahan dalam menjalankan kegiatan penagihan pajak reklame, yaitu:

1. Kelebihan
 - a. Secara garis besar Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sudah melaksanakan proses penagihan pajak reklame sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas telah dilakukan dengan baik pada bagian pendaftaran dan pendataan, penetapan, serta penagihan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perangkapan fungsi.

- c. Dokumen-dokumen yang digunakan sudah baik, format yang digunakan juga baik dan isinya sudah mencakup hal-hal atau keterangan yang diperlukan.
- d. Dokumen-dokumen yang digunakan juga memuat tanda otorisasi dari Kepala Badan berupa tanda tangan dan stempel sebagai bukti persetujuan dari Kepala Badan yang sah.

2. Kelemahan

- a. Prosedur permohonan perijinan pemasangan reklame yang rumit. Dalam praktiknya masih banyak petugas yang mendatangi Wajib Pajak untuk mendaftarkan dan mendaftarkan Wajib Pajak yang akan memasang reklame. Hal ini seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, yaitu dengan cara mendaftar dan datang langsung ke BAPENDA Kota Semarang untuk mengurus perijinan pemasangan reklame, sehingga pelaksanaan prosedur perijinan pemasangan reklame menjadi lebih efisien.
- b. Fungsi yang terkait dalam setiap bidangnya belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dalam praktiknya masih banyak pejabat yang kurang cakap dalam menangani setiap permasalahan yang timbul.
- c. Sering ditemukan reklame yang tidak diketahui Wajib Pajaknya (reklame liar) yang kemudian dapat menghambat pelaksanaan kerja BAPENDA Kota Semarang.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak reklame. Pemerintah sangat berharap adanya kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai Wajib Pajak dengan pemerintah agar terciptanya pelaksanaan kerja yang efektif untuk pencapaian yang optimal.